LAPORAN KINERJA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan suatu sistem Pemerintahan yang baik termasuk dalam menjalankan roda pemerintahan dan melaporkan hasil kinerjanya setiap tahun untuk dapat diketahui oleh publik.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan kegiatan maka Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih terbuka serta dapat melakukan pertanggungjawaban kegiatannya kepada publik, dengan menyusun Laporan Kinerja.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai menyusun Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai Tahun 2020 yang memuat intisari atau materi pokok laporan informasi kerja, sasaran strategis, dan indikator kinerja sasaran, perencanaan dan perjanjian kinerja, akuntabilitas kinerja yang menyangkut pengukuran capaian kinerja, analisis capaian kinerja, dan aspek keuangan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai Tahun 2020 kami menyadari masih jauh dari kesempurnaan namun dengan kesungguhan dan keyakinan untuk mewujudkan instansi yang lebih baik di lingkungan Pemerintah Kota Binjai dan untuk mendorong terciptanya aparatur yang professional dalam penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai kami akan berusaha memperbaikinya di masa yang akan datang.

Harapan kami Laporan Kinerja ini dapat diterima sebagai pertanggungjawaban kinerja serta bahan peningkatan kinerja di masa mendatang di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai dan dapat dijadikan sebagai kajian guna ditindaklanjuti dan diperbaiki pada masa yang akan datang.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

ALFAN SIREGAR, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621006 199008 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

IKHTISAR EKSEKUTIF ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN .....

A, Kondisi Umum **1**

1. Latar Belakang 1
2. Maksud dan Tujuan 2
3. Kondisi Nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 4
   - 3.1. Susunan Organisasi 4
   - 3,2. Tugas Pokok dan Fungsi 5
   - 3.3 Sumber Daya Aparatur 6
4. Sistimatika Penulisan Laporan Kinerja 2020 8

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 10

A. Rencana Strategis **10**

1. Pernyataan Visi 10
2. Pernyataan Misi 10
3. Tujuan Strategis 11
4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran 13

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 ..... **15**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja **19**

1. Target dan Realisasi Capaian Tahun 2020 19

B. Analisis Capaian Kinerja **21**

1. Target dan Realisasi Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2019-2020 21
2. Kendala / Hambatan Pencapaian Target Tahun 2020 24
3. Target dan Realisasi sasaran Strategis / Indikator Kinerja pada RENSTRA 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 25

C. Akuntabilitas Keuangan **26**

1. Keadaan Tahun 2020 , Program, Anggaran, Realisasi, dan Capaian (%) 26

D. Perbandingan Pendapatan Daerah Terhadap PAD 29

BAB IV PENUTUP **31**

A. Kesimpulan **31**

B. Saran – saran **31**

Indikator Kinerja Utama (IKU) **33**

Lampiran – 1 : Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Lampiran – 2 : Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Tahun 2020

IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam tata kepemerintahan yang baik adalah azas akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada seluruh pemangku kepentingan sesuai amanah dan mandat yang diterima. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai sebagai salah satu instansi penunjang tugas Walikota Binjai dalam merumuskan kebijaksanaan di bidang Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dituntut untuk lebih profesional, transparan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan di Kota Binjai.

Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik dalam bentuk Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja ini menyajikan berbagai capaian sasaran dalam berbagai bidang sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, sekaligus menggambarkan tingkat capaian sasaran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai berfungsi sebagai :

1. Bahan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan instansi yang bersangkutan dalam melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan.
2. Bahan evalusi untuk mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai dan meningkatkan kinerja atas kegagalan ataupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas.

Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah Kota Binjai demi mencapai sasaran utama yang telah ditetapkan diawal tahun. Hambatan utama dalam penyusunan Laporan Kinerja ini adalah belum berjalannya secara utuh Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) khususnya pada : Perencanaan Kinerja yang terukur, Pengumpulan Data Kinerja, Monitoring dan Evaluasi Data Kinerja. Data kinerja dilaporkan dalam Laporan Kinerja ini dirangkum berdasarkan laporan dan data yang dihimpun dari berbagai sumber yang belum mempunyai sistem pengumpulan data kinerja yang memadai. Terhadap indikator kinerja sasaran yang tidak tercapai akan dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja pada tahun mendatang yaitu:

1. Diupayakannya agar setiap SKPD menyelesaikan SPJ dan laporan keuangan tepat pada waktunya.

2. Ditingkatkannya kinerja para aparatur dan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai yang maksimal dengan meningkatkan disiplin PNS dalam bekerja.
3. Adanya keselarasan dalam pekerjaan dengan target yang akan dicapai.
4. Selalu berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait permasalahan yang dihadapi dalam merealisasikan program dan kegiatan.
5. Melakukan monitoring dan cek fisik langsung ke lapangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang dilaksanakan.

Deskripsi tersebut diharapkan mampu memberikan kriteria penilaian tersendiri terhadap keberhasilan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai khususnya dalam kompetisinya selaku organisasi yang membantu Walikota Binjai dalam menunjang tugas-tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kota Binjai.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

AFFAN SIREGAR, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621006 199008 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

1. Kondisi Umum

1. Latar Belakang

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai merupakan salah satu instansi pemerintah di lingkungan Pemerintahan Kota Binjai yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan pendapatan dan aset daerah Kota Binjai.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagai dasar pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Kota Binjai di bidang pengelolaan keuangan pendapatan dan aset daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Binjai melalui Sekretaris Daerah Kota Binjai. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai sebagai salah satu instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Binjai dituntut untuk mewujudkan suatu instansi pemerintahan yang bersih, transparansi akuntabilitas dan berwibawa (*Clean Goverment and Good Governance*).

Perbaikan Pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Hal ini merupakan prasyarat bagi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan suatu sistem Pemerintahan yang baik termasuk dalam menjalankan roda pemerintahan dan melaporkan hasil kinerjanya setiap tahun untuk dapat diketahui oleh publik. Pemerintah telah menetapkan kebijakan dengan sistim pertanggungjawaban yang jelas, teratur dan efektif yang disebut dengan Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai perwujudan dari kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan

kinerja instansi pemerintah. Tujuan SAKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.

Untuk mewujudkan kondisi pemerintahan yang baik, Good Governance, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai (BPKPAD) harus menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahun dalam rangka mempertanggungjawabkan atau mengukur sejauh mana keberhasilan tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Binjai dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Akuntabilitas Kinerja adalah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban instansi Pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

2. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD. Penyelenggaraan SAKIP ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan yang meliputi :

1. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi pemerintah dalam periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini menjadi dokumen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan serta menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.

2. Perjanjian Kinerja

Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja selain berisi mengenai perjanjian penugasan/pemberian amanah, juga terdapat sasaran strategis, indikator kinerja

dan target yang diperjanjikan untuk dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pecapaian sasaran strategis.

3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/ dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD tahun berjalan. Pengukuran kinerja dilakukan oleh penerima tugas atau penerima amanah pada seluruh instansi pemerintah.

4. Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja merupakan proses pencatatan, penatausahaan dan penyimpanan data kinerja serta melaporkan data kinerja. Pengelolaan data kinerja mempertimbangkan kebutuhan instansi pemerintah sebagai kebutuhan manajerial, data/ laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik pemerintah.

5. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja adalah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja tersebut terdiri dari Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan. Laporan Kinerja Tahunan paling tidak memuat perencanaan strategis, pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah, realisasi pencapaian sasaran strategis dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja.

Laporan Kinerja (LK) memiliki 2 (dua) fungsi utama sekaligus.

Pertama: Laporan Kinerja merupakan sarana bagi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai Untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

Kedua : Laporan Kinerja merupakan sarana evaluasi atas penyampaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Kedua fungsi Laporan Kinerja (LK) tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja (LK).

Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LK) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai Tahun 2020 mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja (LK) Tahun 2020 sebagai sarana pertanggungjawaban Inspektorat Kota Binjai atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2020 serta menjelaskan hal-hal yang belum berhasil dicapai.
- Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan Internal Organisasi, menjadikan Laporan Kinerja (LK) 2020 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai. Dengan adanya Laporan Kinerja (LK) ini, manajemen Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai dapat merumuskan strategi pemecahan masalah yang dihadapi, sehingga capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

3. Kondisi Nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

3.1. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 48 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai, dimana susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris, terdiri dari :
   - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   - Sub Bagian Keuangan;
   - Sub Bagian Program.
3. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
   - Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung;
   - Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Langsung;
   - Sub Administrasi dan Pelaporan Perbendaharaan.
4. Bidang Anggaran, terdiri dari :
   - Sub Bidang Belanja Langsung;
   - Sub Bidang Belanja Tidak Langsung;
   - Sub Bidang Verifikasi Anggaran Belanja dan Pendapatan.
5. Bidang Akuntansi, terdiri dari :
   - Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja Daerah;
   - Sub Bidang Pelaporan Pendapatan dan Belanja;
   - Sub Bidang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

6. Bidang PBB dan BPHTB terdiri dari :
   - Sub Bidang Pelayanan PBB dan BPHTB;
   - Sub Bidang Penetapan PBB dan BPHTB;
   - Sub Bidang Pengendalian PBB dan BPHTB.
7. Bidang Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya terdiri dari :
   - Sub Bidang Pelayanan Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya;
   - Sub Bidang Penetapan Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya;
   - Sub Bidang Pengendalian Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya.
8. Pengelolaan Aset Daerah, terdiri dari :
   - Sub Bidang Pendataan Aset Daerah;
   - Sub Bidang Optimalisasi Aset;
   - Sub Bidang Pengendalian Aset Daerah.
9. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

3.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai diatur dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 48 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai.

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan pendapatan dan aset daerah Kota Binjai. Selanjutnya untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
b. melaksanakan penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
c. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
d. melaksanakan laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
e. melaksanakan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan tata laksana kantor;

f. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penagihan PBB, BPHTB, retribusi dan pajak daerah lainnya;
g. melakukan koordinasi penyusunan rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengembangannya (ekstensifikasi/intensifikasi);
h. menyiapkan rencana kebijakan dan atau strategi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembayaran tagihan PBB, BPHTB, Retribusi dan pajak daerah lainnya;
i. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
j. melaksanakan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
k. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
l. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
m. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
n. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
o. melaksanakan penilaian atas kinerja/prestasi kerja bawahan; dan
p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.3. Sumber Daya Aparatur

Untuk memenuhi struktur organisasi Badan tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai memiliki jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 112 (seratus dua belas) orang, dimana PNS yang memiliki Esselon II sebanyak 1 (satu) orang, Esselon III sebanyak 7 (tujuh) orang, Esselon IV sebanyak 20 (dua puluh) orang dan Staf sebanyak 85 (delapan puluh lima) orang ditambah Tenaga Honorer sebanyak 82 (delapan puluh dua) orang.

Secara umum tingkat pendidikan sumber daya aparatur yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai relatif tinggi dengan rincian sebagai berikut :

a. Tenaga PNS sebanyak 112 orang, terdiri dari :
   - Pasca Sarjana (S2) : 5 orang
   - Sarjana (S1) : 79 orang
   - Sarjana Muda (D3) : 6 orang
   - SLTA/SMK : 20 orang
   - SLTP : 2 orang

b. Tenaga Honorer sebanyak 82 orang berpendidikan SLTA, D3 dan S1.

Jumlah dan tingkat pendidikan PNS dan Tenaga Honorer pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai dapat terlihat pada Tabel 1.1. Sedangkan Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Dilihat dari segi beban kerjanya, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai telah cukup memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Namun demikian masih sangat perlu membekali SDM dengan berbagai pelatihan struktural maupun teknis fungsional. Hal ini perlu agar tercipta keseimbangan antara personil yang berkualifikasi pendidikan dengan tuntutan tugas yang diemban.

Dalam hal sarana dan prasarana, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai belum dapat dikatakan representatif. Hal ini dilihat dari sarana dan prasarana gedung yang belum memadai maupun fasilitas-fasilitas lainnya seperti kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua.

4. Sistimatika Penulisan Laporan Kinerja 2020

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai selama Tahun 2020. Capaian Kinerja *(Performance Result)* tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja *(Performance Plan)* sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai Tahun 2020 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama *(strategic issued)* yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah
   yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja
6. Alternatif solusi yang telah dilakukan;
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Tabel 1.1
Daftar Nama, Jabatan, Pangkat, Tingkat Pendidikan Pegawai
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

No	N a m a	N I P	Jabatan	G o l	Pendidikan	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**Affan Siregar, SE**	**19621006 199008 1 001**	**Kepala Badan**	**IV/c**	**S1**	**KRISNADWIPAYANA JAKARTA**
2	**Ir. Idham Amru Taufiq Hrp, MM**	**19661021 199402 1 002**	**Sekretaris**	**IV/b**	**S2**	**UISU**
3	Irwan Effendi, S. Sos	19660112 198903 1 002	Kasubbag Program	III/d	S1	UMA
4	Aswita Yuni Nasution, SE	19790623 200903 2 004	Kasubbag Keuangan	III/b	S1	PELITA BANGSA
5	Alwi Darmansyah	19730626 199503 1 002	Kasubbag Umum & Kepegawaian	III/d	SMA	SMA 7 MEDAN
6	Natalia D. Br. Ginting, SH	19711219 200212 2 001	Staf	III/d	S1	ST.THOMAS
7	Yuanda DT. Majo Basa, ST	19790626 200502 1 001	Staf	III/d	S1	USU
8	Radhiyatul Hikmah, ST	19831003 200903 2 013	Staf	III/c	S1	USU
9	Agustina Hasibuan, S. Sos	19860818 200502 2 001	Staf	III/c	S1	USU
10	Helly Herlinda, SE, M.S.M	19820902 201003 2 002	Staf	III/c	S2	UNIMAL
11	Iswan Yasri Nst, SE	19701010 200502 1 003	Staf	III/b	S1	PELITA BANGSA
12	Siti Holida Marpaung, SH	19760618 200701 2 006	Staf	III/b	S1	PANCA BUDI
13	Eliani, A.Md	19790213 200604 2 010	Staf	III/b	D3	ASMI LANCANG KUNING
14	Julianti Fitri, S.Sos	19830713 200604 2 020	Staf	III/b	S1	UMA
15	Zulfian Tanzil, SH	19751217 200903 1 002	Staf	III/b	S1	
16	Muhammad Junaidi, S.Sos	19760314 201001 1 013	Staf	III/a	STM	STM BABALAN
17	Dewi Fauziah Rahman, SP	19770214 201212 2 001	Staf	III/b	S1	USU
18	Monarita	19830413 200901 2 001	Staf	II/c	SMK	SMK N 1 BINJAI
19	**Mhd. Husin, S.Sos**	**19680820 199303 1 008**	**Kabid Perbendaharaan**	**IV/a**	**S1**	**USU**
20	Juriah, S.Sos	19720417 199303 2 002	Kasubbid. Perbend.Belj. Tidak Langsung	III/d	S1	DHARMA AGUNG
21	Suardi, SE	19830101 201001 1 046	Kasubbid. Administrasi dan Pelaporan Perbendaharaan	III/c	S1	TRIKARYA
22	Lailan Azizah, SE	19761123 201001 2 004	Staf	III/c	S1	NOMENSEN
23	Priyadi, SE	19690704 199203 1 002	Staf	III/c	S1	DHARMA AGUNG
24	Julianda Indah Sari Situmorang, SE	19860816 201001 2 011	Staf	III/c	S1	USU
25	Eva Irawati, S.Sos	19811015 200604 2 020	Staf	III/b	S1	DHARMA AGUNG
26	Dear Venty Akhirini Tarigan, A.Md	19780214 200604 2 010	Staf	III/b	D3	USU
27	Satria Yudha Atmaja, SE	19850425 201001 1 009	Staf	III/b	S1	PELITA BANGSA
28	Anugerah Alexander, SE	19860329 201001 1 015	Staf	III/b	S1	PELITA BANGSA
29	Siska Maya Sari S, SE	19870122 201001 2 016	Staf	III/b	S1	PELITA BANGSA
30	M. Yamin	19630912 200604 1 001	Staf	II/d	SMA	TAMAN SISWA
31	Kartika Sari	19770320 200701 2 004	Staf	II/d	SMA	DARMAWANGSA
32	Suhendi	19760412 200901 1 001	Staf	II/c	STM	STM TUNAS PELITA
33	**M. Rifi Hamdani, S.AB**	**19841227 200502 1 001**	**Kabid Anggaran**	**III/c**	**S1**	**STIA IAN**
34	Alfian, S.Sos	19661018 199108 1 001	Kasubbid. Belanja Tdk Langsung	III/d	S1	UMA

1	2	3	4	5	6	7
35	Mira Yanti Rawi, SE	19821020 200903 2 007	Kasubbid. Belanja Langsung	III/d	S1	UPN VETERAN
36	Iqbal Mustafa, SE	19800525 201001 1 027	Kasubbid. Verifikasi Anggaran Belanja dan Pendapatan	III/c	S1	DARMAWANGSA
37	Yahya Ginting, SE	19780326 200804 1 001	Staf	III/c	S1	UNIV. MEDAN AREA
38	Novita Khairani Daulay, SE	19791107 201001 2 024	Staf	III/c	S1	UMSU
39	Hesty Novalina Manik, SE	19870408 201101 2 007	Staf	III/c	S1	HKBP Nomensen
40	Sandra Sukma Dewi, SE	19781124 201001 2 003	Staf	III/b	S1	UNIV. PUTRA INDONESIA, PDG
41	Salamudin, SE	19800918 200502 1 004	Staf	III/b	S1	PANCA BUDI
42	Khairunnisa, SE	19821109 201406 2 001	Staf	III/b	S1	UISU
43	Zulfina, S.E.	19840924 201508 2 001	Staf	III/b	S1	USU
44	Dewi Masyitah Nasution, SE	19901204 201503 2 005	Staf	III/a	SI	USU
45	Roy Johannes Sembiring, S.Kom	19920513 201903 1 004	Staf	III/a	SI	STMIK MIKROSKIL
46	Susilo	19681015 200801 1 001	Staf	II/a	SMP	SMP 1 BINJAI
47	**Ahmad Fauzan Nasution, S.Si, M. AP**	**19821224 200502 1 001**	**Kabid Akuntansi**	**III/d**	**S2**	**UMA**
48	Wanda Riswahyudi, SE	19830102 200804 1 001	Kasubbid Akuntansi Pdptn dan Blnja.	III/d	S1	STIE HARAPAN
			Kasubbid Pelaporan Pdptn dan Blnja.			
49	Hasmar Nasution ,SE	19781024 200903 1 001	Kasubbid Sistem Informasi Keu. Daerah	III/c	S1	UMSU
50	Sukirno, SE	19680429 199803 1 002	Staf	IV/a		
51	Roy Chandra Kusumah, ST	19791109 201003 1 001	Staf	III/c	S1	USU
52	Fortuna Panca Suriyanti Putri, SE	19850415 201101 2 009	Staf	III/c	S1	USU
53	Reni Anggreini, SE	19860913 201101 2 018	Staf	III/c	S1	UISU
54	Duwi Purwati, SE	19850317 201103 2 001	Staf	III/c	S1	UMSU
55	Indra Muda Nasution	19730226 199602 1 001	Staf	III/b	SMA	MEULABOH
56	Malwi, SE	19860414 201001 1 012	Staf	III/b	S1	PELITA BANGSA
57	Melda Agustina Kaban, S.E	19890812 201903 2 008	staf	III/a	S1	
58	Rizky Afrisha Samura, A.Md	19870416 201102 1 001	Staf	II/d	D3	PANCA BUDI
59	Julianti	19760705 201001 2 008	Staf	II/c	SMA	PALAPA
60	**Amal, S.Sos**	**19721101 199203 1 001**	**Kabid PBB DAN BPHTB**	**III/d**	**S1**	**STIA LAN**
61	Citra Subhan Lubis, SH	19850802 201001 1 006	Kasubbid Pelayanan PBB dan BPHTB	III/b	S1	PANCA BUDI
62	Khairida, SE	19850806 200502 2 001	Kasubbid Penetapan PBB dan BPHTB	III/c	S1	UNIMED
63	Wira Gunawan, S.Sos	19790712 200801 1 021	Kasubbid Pengendalian PBB dan BPHTB	III/b	S1	UMA
64	Winarti, S.Sos	19740708 199402 2 002	Staf	III/d	S1	UMA
65	Vina Ananda Vagita Lubis, SE	19840731 200804 2 001	Staf	III/d	S1	
66	Aisiyah	19700501 199303 2 010	Staf	III/c	SLTA	SMA
67	Jerny Sarmaida Monalisa Aritonang,SE	19730105 200502 2 004	Staf	III/c	S1	STIE SIA
68	Mustika Sari, SH	19810405 200701 2 003	Staf	III/b	S1	PANCA BUDI
69	Agung Baskara Lubis, SE	19840722 201001 1 020	Staf	III/b	S1	
70	Rahmawati, SE	19741002 201406 2 001	Staf	III/b	S1	STIE ATMATERA
71	Maria Flora Jublina Sinaga, SE	19860926 201001 2 030	Staf	III/b	S1	UNISLA

1	2	3	4	5	6	7
72	Andi Antorio Ginting, SH	19820330 200801 1 002	Staf	III/a	S1	UMA
73	Hervina, A.Md	19840521 200903 2 004	Staf	III/a	D3	USU
74	Afwita Hafni Pratiwi, A.Md	19830831 201001 2 024	Staf	III/a	D3	POLMED
75	Afrizal	19730410 200604 1 015	Staf	II/c	SMA	SMA BAHOROK
76	Benny Prawira Tarigan	19790423 200901 1 004	Staf	II/c	SMA	SMA 1 BINJAI
77	Muhammad Fadli	19860320 201001 1 004	Staf	II/c		
78	Cindy Prasasti	19791017 201212 2 003	Staf	II/b	SMU	SMU Harapan
79	Ivonilla Sari	19800322 201212 2 002	Staf	II/b	SMEA	SWATA SETIA BUDI
80	**Elfitra Hariadi, SE**	**19800424 200701 1 004**	**Plt. Kabid Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya**	**III/c**	**S1**	**UMSU**
81	Tigor Sihotang, S.Sos	19670829 199203 1 005	Kasubbid Penetapan Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya	III/d	S1	UDA
82	Muhammad Syahrin Asman, SE	19711012 200003 1 003	Kasubbid Pengendalian Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya	III/d	S1	PANCA BUDI
83	Fitri Ulyani Nasution, S.Sos	19761029 199703 2 004	Kasubbid Pelayanan Retribusi dan Pajak Daerah Lainnya	III/d	S1	UMA
84	Novia Susanti, SE	19840313 200604 2 024	Staf	III/d	S1	UISU
85	Arief Rahman Syahputra, SH	19791221 200903 1 004	Staf	III/c	S1	UISU
86	Astika Dewinta Ginting, SE	19801007 200903 2 009	Staf	III/c	S1	Nomensen
87	Juni Melfiza Khairani Hsb, S.Sos	19730622 200701 2 002	Staf	III/b	S1	UMA
88	Nurhasanah Lubis, S.H.	19841104 200604 2 004	Staf	III/b	S1	Darma Agung
89	Diana Rosa Harahap, S.STP	19920809 201406 2 001	Staf	III/b	S1	IPDN
90	Junita Hariani Manalu, SE	19860612 201503 2 002	Staf	III/b	S1	UNIMED
91	Jaya, SE	19730411 200901 1 002	Staf	III/a	S1	PELITA BANGSA
92	Roland Halomoan Panjaitan, SE	19861224 201506 1 001	Staf	III/a	S1	NOMENSEN
93	Muhammad Dhani Aswan	19800813 200502 1 002	Staf	II/d	SMA	SMA 3 BINJAI
94	Syahril	19621211 200604 1 003	Staf	II/d	SMA	SMAN 3 BINJAI
95	Ahmadsyah	19800919 200901 1 007	Staf	II/c	SMK	PUTRA ANDA BINJAI
96	Irwansyah Sebayang	19810709 200801 1 003	Staf	II/c	SMK	TELADAN BINJAI
97	Argenta Bangun	19840615 200901 1 003	Staf	II/c	SMK	SWAKARYA
98	Nazar Ruddin	19790713 201001 1 018	Staf	II/c	SMK	SATRIA
99	Wahyu Hidayat	19860225 200901 1 001	Staf	II/a	MTS s	DARUL ARAFAH
100	**Ali Bosar Hasibuan, S. Ag., MM**	**19721105 199803 1 003**	**Kabid Pengelolaan Aset Daerah**	**IV/a**	**S2**	
101	Sari Yuni, SH	19810601 201406 2 007	Kasubbid Optimalisasi Aset	III/b	S1	PANCA BUDI
102	Umrizal Ginting, SE	19830215 200903 1 004	Kasubbid Pendataan Aset Daerah	III/d	S1	UISU
103	Elisabet Novita Barus, SE	19800511 201001 2 023	Kasubbid Pengendalian Aset Daerah	III/c	S1	UNIKA
104	Katarina Sitorus, SH	19671019 199603 2 004	Staf	III/d	S1	NOMENSEN
105	Syamsuddin, SE	19810516 200502 1 001	Staf	III/d	S1	
106	Imron, ST, MMPP	19761109 201101 1 001	Staf	III/c	S1	

1	2	3	4	5	6	7
107	Yunita Tiffany Harahap, S.IP	19930609 201507 2 002	Staf	III/b	S1	IPDN
108	Yahya Al Habibi, A.Md	19791106 200804 1 001	Staf	III/a	D3	UISU
109	Purnama Dewi Silalahi, SE	19741018 200801 2 001	Staf	III/a	S1	
110	Rini Widyastuti, SE	19850812 201001 2 010	Staf	III/a	S1	
111	Syahrial Efendi, S.E	19900509201903 1 002	Staf	III/a	S1	
112	Indra Gunawan	19800218 201212 1 002	Staf	II/b	SMK	SMK Setia Budi

Daftar Nama & Tingkat Pendidikan Pegawai Honorer
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai
Tahun 2020

NO	NAMA	PENDIDIKAN	PETUGAS	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	IPAN SYAHPUTRA	SMU	Pembukuan	
2	MIZUAR HAJIJI	SMA	Pengarsip Surat	
3	SRI REZEKI MUHARIANI	SMA	Pengarsip Surat	
4	AMRI	S1	Teknisi Listrik	
5	NURBAYANA, SE	S1 Ekonomi	Administrasi	
6	SITI SABARIAH, SH	S1 Hukum	Administrasi	
7	DHITA TARI FAFIOLA	S1 Ekonomi	Administrasi	
8	CHIQUITA MELIALA	S1	Pembukuan	
9	REZA CHAIRUL AKBAR	SMA	Pengutip Lapangan	
10	TIKA CHAIRANI	SMA	Pelayanan PBB dan BPHTB	
11	MITA DEWI	SMK	Lapangan Pembantu	
12	INDAH SRI REZEKI	S1	Pelayanan PBB dan BPHTB	
13	ASRIYANI LESTARI DAULAY	SMA	Pelayanan PBB dan BPHTB	
14	LILIA RIANDA OTHARY SIREGAR	SMA	Pelayanan PBB dan BPHTB	
15	RAODAH	S1	Operator Komputer	
16	NOVA SANTY	D3	Operator Komputer	
17	INDAH SARI	D3 Komputer	Operator Komputer	
18	YENNI SYAHFITRI LUBIS	SMK	Operator Komputer	
19	HARDIANSYAH	SMU	Tenaga Terampil Komputer	
20	DEVI MANDA SARI	SMA	Lapangan Pembantu	
21	IMA	SMK	Lapangan Pembantu	
22	ANDI ALEXANDER	SMA	Lapangan Pembantu	
23	STEFANNY	D3	Lapangan Pembantu	
24	NUR AZIZAH NASUTION	S1	Lapangan Pembantu	
25	KASENDA PAHLEZA LIMBONG	S1	Lapangan Pembantu	
26	JOHARI GIRSANG	SMA	Lapangan Pembantu	
27	MEILINDA SAGALA	SMEA	Lapangan Pembantu	
28	SRI WAHYUNI NASUTION	SMK	Lapangan Pembantu	
29	NUR AISYIYAH	S1	Lapangan Pembantu	
30	EMA SUSANTI	SMEA	Lapangan Pembantu	
31	SRI WAHYUNI LUBIS	S1	Lapangan Pembantu	
32	RAHMAT HIDAYAT	SMA	Lapangan Pembantu	
33	IRVAN TARIGAN, AMd	D3	Lapangan Pembantu	
34	JUANDA	S1	Lapangan Pembantu	
35	WAHYUDI INDRAWAN	S1	Pelayanan PBB dan BPHTB	
36	M. RIZKY SAKA PALANA GUNA	SMK	Lapangan Pembantu	
37	PARMONO	SMA	Lapangan Pembantu	
38	M. ALFIRDAUS HASIBUAN	D3	Lapangan Pembantu	

1	2	3	4	5
39	AGUS PRATAMA	SMK	Lapangan Pembantu	
40	MUHAMMAD KHOLIL HARAHAP	S1	Lapangan Pembantu	
41	WILLY DESFRIZAL	SMK	Lapangan Pembantu	
42	BANG ROMI	SMK	Lapangan Pembantu	
43	DESI ARYANI NASUTION	MAN	Lapangan Pembantu	
44	FERNANDES	SMA	Lapangan Pembantu	
45	REZA RENALDY	SMA	Penertiban Pajak	
46	USMAN ZULKARNAIN	SMA	Penertiban Pajak	
47	DESY SYAHPITRI	MAN	Lapangan Pembantu	
48	ABDUL HAFIZ KELIAT	SMA	Lapangan Pembantu	
49	FERRY SYARIFFUDIN LUBIS	SMA	Lapangan Pembantu	
50	EDWARDSYAH	SMA	Lapangan Pembantu	
51	DIMAS AJI UMARSENO	SMA	Lapangan Pembantu	
52	SRI ASIH WAHYUNI	S1	Lapangan Pembantu	
53	SHEILLA PRATIWI			
54	AGUS RYAN MIRANDA	SMA	Lapangan Pembantu	
55	PUTRA SETIAWAN	S1	Pelayanan PBB dan BPHTB	
56	M. IKHSAN AM	SMA	Pengarsip Surat	
57	AGUS SETIAWAN	SMA	Pengutip Lapangan	
58	EDY SYAHPUTRA	SMA	Lapangan Pembantu	
59	RIZKI IKHSAN SYAHPUTRA LUBIS	SMK	Pengutip Lapangan	
60	SATRIA UMBARA	SMA	Pengutip Lapangan	
61	SEFFY HARYADI	SMK	Pengutip Lapangan	
62	SEHMA PUTRA BANGUN	SMA	Pengutip Lapangan	
63	T. AULIA MUFTI SANY	SMA	Pengutip Lapangan	
64	ANDRIAN DILY GINTING	SMA	Penertiban Pajak	
65	MUHAMMAD ADMAJA	SMA	Pengutip Lapangan	
66	RAJA MUDA NASUTION	SMA	Pengutip Lapangan	
67	ANDREW FACHRIZA		Pengutip Lapangan	
68	M. NUR FAZRI		Pengutip Lapangan	
69	VITA SYLVIA SURBAKTI	S1 Komputer	Tenaga Terampil Komputer	
70	ROKAYAH	S1	Pengarsip Surat	
71	MUHAMMAD ADENIN	SMA	Operator Komputer	
72	GITA PRATIWI	SMA	Operator Komputer	
73	DEWI ANGGRAINI	SMA	Kebersihan	
74	RAHMAINI	SMP	Kebersihan	
75	ERMA CHROSMAWATI	SMK	Kebersihan	
76	YUSMAYANTI	SMA	Kebersihan	
77	RINI SUSANTI	SD	Kebersihan	
78	TEDDI GUNAWAN	SMP	Kebersihan	
79	NENG SRI CHAIRIAH	SMU	Kebersihan	
80	MARLIANTI LAILI	SMA	Kebersihan	
81	SUTRIADI	SMA	Jaga Malam	

1	2	3	4	5
82	ZEFRI YAN SYAHPUTRA		Jaga Malam	

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

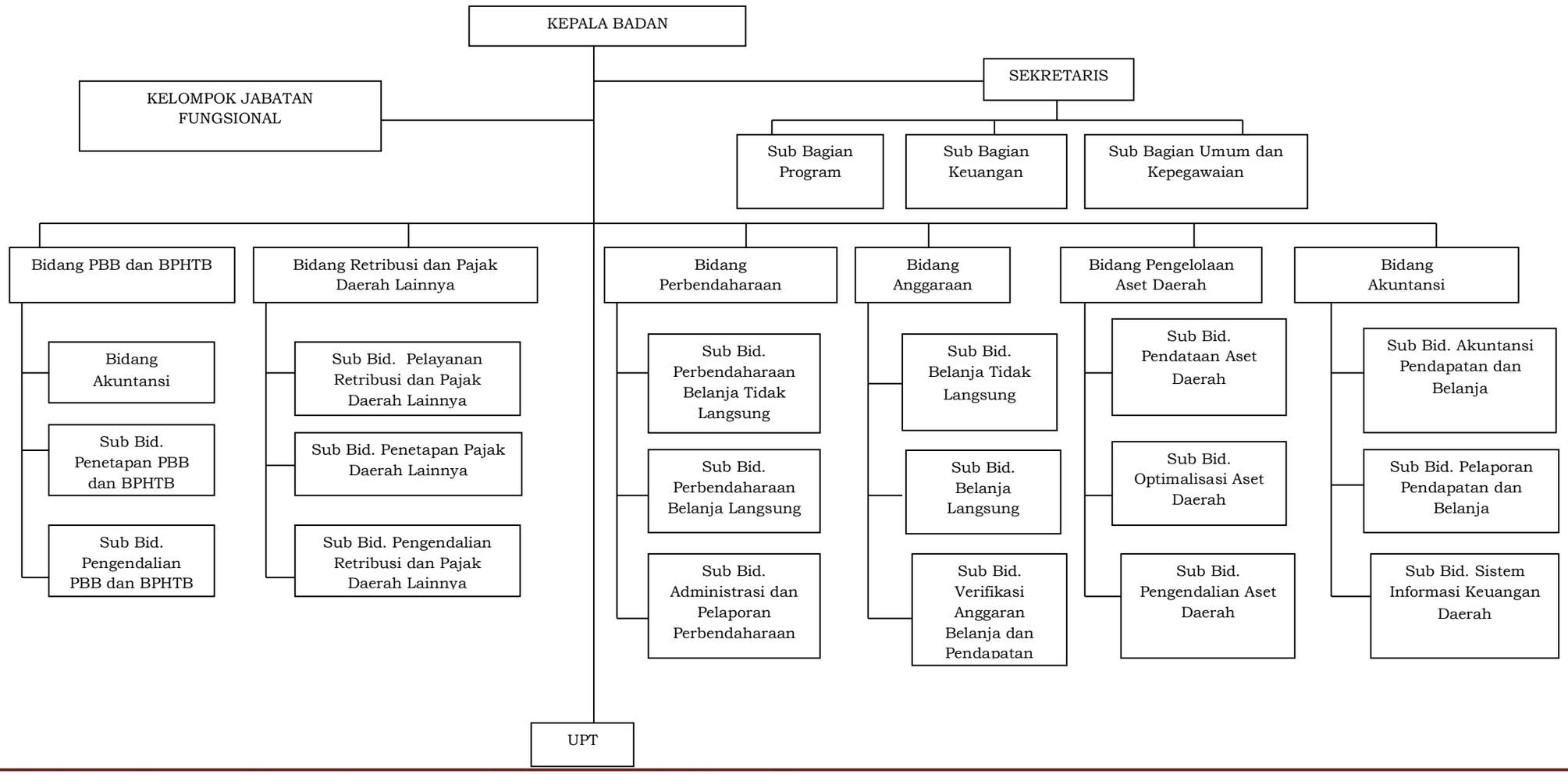

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

A. Rencana Strategis

1. Pernyataan Visi

Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai dengan instansi terkait lainnya untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rencana Strategis badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 – 2021.

Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Walikota terkait dengan penetapan/ kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Dalam rangka mencerminkan apa yang diinginkan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai dan sebagai arah dan fokus organisasi yang diharapkan serta menumbuhkan komitmen bagi seluruh staf Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai secara berkesinambungan, maka visi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai adalah :

"TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH YANG PROFESIONAL DALAM RANGKA MENINGKATKAN KAMAMPUAN KUANGAN DAERAH DAN TERLAKSANANYA TERTIB ADMINISTRASI PENGELOLAAN ASET DAERAH KOTA BINJAI."

2. Pernyataan Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Misi adalah tindakan nyata yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal organisasi dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang.

Sejalan dengan hal tersebut, maka Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai merumuskan pernyataan misi sebagai berikut :

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan penyusunan perangkat hukum tentang pendapatan sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Efektifitas dan efisiensi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran melalui penerapan anggaran yang berbasis kinerja dan analisis standar belanja.
3. Trasparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dan pelaporan penatausahaan penerimaan dan belanja daerah.
4. Peningkatan tertib administrasi aset daerah dalam rangka menyusun laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah.
6. Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka pengelolaan pajak dan rertribusi daerah.

3. Tujuan Strategis

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai menetapkan tujuan strategis berdasarkan Visi dan Misi organisasi. Di dalamnya juga terdapat sasaran-sasaran strategis yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi yang dirumuskan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut di atas, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai pada Tahun Anggaran 2020 telah menyusun 5 (lima) program kerja dan 52 (lima puluh dua) kegiatan, yang semuanya menitikberatkan pada 1 (satu) tujuan strategis yang ingin dicapai, yaitu :

Meningkatkan kemampuan keuangan daerah, kualitas Sumber Daya Aparatur, penganggaran belanja daerah, pengelolaan pajak dan retribusi daerah, pengelolaan asset daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah sehingga mampu melaksanakan pengelolaan keuangan dan asset daerah secara efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan misi tersebut di atas, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam periode Tahun Anggaran 2020. Lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Tujuan, Sasaran dan Program Kerja

TUJUAN		SASARAN		PROGRAM	
1.	Meningkatkan kemampuan keuangan daerah, kualitas SDM, penganggaran belanja daerah, pengelolaan pajak dan retribusi daerah, pengelolaan aset daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah sehingga mampu melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan.	1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik.	1.	Program pelayanan administrasi perkantoran
		2.	Meningkatkan kualitas laporan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
		3.	Meningkatkan efisiensi belanja dan pengelolaan aset daerah secara optimal.	3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
		4.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak dan retribusi daerah	4.	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		5.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan sistem pengendalian intern.	***5.***	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran

Dengan ditetapkannya tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai maka untuk memudahkan mencapai tujuan tersebut, harus terlebih dahulu diturunkan menjadi beberapa sasaran sehingga diharapkan dengan tercapainya sasaran yang telah disusun dengan sendirinya akan mendorong tercapainya tujuan tersebut.

Pada tahun 2020, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai telah menyusun 5 (lima) program kerja dan 52 (lima puluh dua) kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang dimaksud adalah :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,** terdiri dari :
   1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
   2) Penyediaan Jasa Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik;
   3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional;
   4) Penyediaan Jasa Administrasi Pengelola Keuangan;
   5) Pemyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
   6) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
   7) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
   8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
   9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
   10) Penyediaan Makanan dan minuman;
   11) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;
   12)Penyediaan Jasa Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Non PNS;
   13) Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor.
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** terdiri dari :
   1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
   2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
   3) Pengadaan Mebeleur;
   4) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor;
   5) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional;
   6) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
   7) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor;
   8) Pemeliharaan Jaringan Online Sistem Informasi Keuangan Daerah;
3. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** terdiri dari :
   1) Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulan dan Semesteran;

4. **Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah** terdiri dari :
    1. Pengelolaan SISMIOP dan Pelayanan PBB–BPHTB
    2. Operasi Penertiban Pajak Daerah
    3. Pemeliharaan Sistem IT PAD
    4. Pengelolaan Pajak Daerah
    5. Penyusunan Perubahan APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2020
    6. Penyusunan APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2021
    7. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) P. APBD Kota Binjai Tahun 2020
    8. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) P. APBD Kota Binjai Tahun 2020
    9. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kota Binjai Tahun 2020
    10. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Binjai TA. 2021
    11. Monitoring dan Evaluasi PAD
    12. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Se-Kota Binjai
    13. Pendataan dan Penjaringan Potensi Baru Pajak Daerah Kota Binjai
    14. Pemeliharaan Sistem IT PBB
    15. Penyampaian SPPT PBB Tahun 2020
    16. Pembuatan Aplikasi BPHTB
    17. Peningkatan Manajemen Aset Pemko Binjai
    18. Pensertifikatan Tanah- Tanah Milik Pemerintah Kota Binjai
    19. Penyusunan Pertanggung Jawaban APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2020
    20. Operasi Sisir dan Operasi Pencapaian Target
    21. Sosialisasi PBB dan BPHTB
    22. Penjualan Barang-Barang Milik Pemerintah Kota Binjai
    23. Penghapusan Barang/ Gedung Milik Pemerintah Kota Binjai
    24. Penilaian Barang Milik Pemerintah Kota Binjai
    25. Penatausahaan Barang-barang Inventaris OPD Se-Kota Binjai
    26. Penyusunan dan Implementasi SOP Penatausahaan, Penetapan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak Daerah
    27. Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
    28. Percepatan Penyelesaian Permasalahan Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pengelolaan Aset Daerah serta Fasum Fasos Kota Binjai

29. Penyediaan Aplikasi Pengelolaan Pajak Daerah

5. **Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH** terdiri dari :
   1) Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Kota Binjai Tahun 2019;

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang sangat perlu dilakukan oleh Pimpinan Instansi di lingkungan Pemerintah karena merupakan wahana yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan Kinerja yang dilakukan Instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai oleh sumber dana yang terbatas. Dengan Perencanaan Kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan atau mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik sehingga tidak ada kegiatan yang tidak tepat sasaran.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, setiap tahun Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai berusaha untuk memaksimalkan seluruh kemampuannya dalam mengelola keuangan dan asset daerah dengan baik. Renstra sebagai dasar dalam mencapai tujuan strategis organisasi telah memuat sasaran-sasaran strategis beserta indikator kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun berikutnya. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai Tahun 2016 – 2021 disusun suatu Rencana Tahunan *(Annual Performance Plan)* setiap tahunnya. Rencana Tahunan tersebut dimulai dengan penetapan kinerja yang dimuat ke dalam Rencana Kerja setiap tahunnya oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai terus berusaha memperbaiki diri dalam mengelola keuangan dan asset daerah Kota Binjai menuju ke arah yang lebih baik, pengelolaan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KOTA BINJAI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AFFAN SIREGAR, SE
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai
Selanjutnya disebut **pihak pertama.**

Nama : H.M. IDAHAM, SH, M.Si
Jabatan : WALIKOTA BINJAI
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai,

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
H.M. IDAHAM, SH, M.Si	**AFFAN SIREGAR, SE**

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan mutu dan kualitas pengelolaan aset daerah.	Persentase Pengelolaan Aset Daerah yang akuntabel	90%
2.	Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Binjai	Tingkat kemandirian keuangan daerah (ratio PAD) dibandingkan pendapatan daerah	13%

Binjai,

Pihak Kedua, **Pihak Pertama,**

H.M. IDAHAM, SH, M.Si **AFFAN SIREGAR, SE**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan / pemberi amanah. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam laporan ini, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016 - 2021 maupun Renja Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi instansi Pemerintah Kota Binjai.

A. Pengukuran Capaian Kinerja.

1. Target dan Realisasi Capaian Tahun 2020

Rencana Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai Tahun 2020 menggambarkan bagaimana mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan atau target kinerja Tahun 2020 dengan orientasi pencapaian sasaran strategis tahunan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Rencana kinerja Tahun 2020 ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi. Dengan demikian seluruh proses pencapaian dan pengendalian aktivitas operasional Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai sepenuhnya dapat dirujukkan pada Rencana Kinerja Tahun 2020 ini.

Berdasarkan pendekatan perencanaan yang menggunakan Rencana Kinerja Tahunan ini, akan tercermin adanya komitmen-komitmen baru terhadap perubahan kondisi yang sudah tidak sesuai lagi dengan asumsi-asumsi yang digunakan dalam melakukan analisis faktor internal dan eksternal pada tahap penyusunan Renstra. Perubahan kondisi tersebut bisa jadi menuntut dilakukannya segera rencana tindak lanjut yang akan mengakomodasi dan sekaligus menunjukkan langkah antisipatif dan responsive terhadap perubahan kondisi lingkungan.

Langkah penyusunan yang dilakukan dapat berupa penyesuaian terhadap sasaran tahunan dan strategi pencapaiannya, meski tidak harus melakukan revisi lebih dahulu terhadap Renstra. Hal ini ditempuh dengan pertimbangan bahwa revisi Renstra akan membutuhkan waktu yang cukup lama, karena harus mengikuti prosedur/ tata cara perubahan Peraturan Daerah, sebagaimana berlaku juga terhadap Renstra.

Kegiatan yang telah ditetapkan pada APBD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 dalam beban Belanja Langsung terdiri dari 52 (lima puluh dua) kegiatan yang dikemas dalam 5 (lima) Program. Khusus untuk Program yang terkait dalam Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah terdapat 2 (dua) program yaitu Program Peningkatan Pengembangan Keuangan Daerah yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) kegiatan dan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH terdiri dari 1 (satu) kegiatan , adapun Rencana Kinerja yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Program Kegiatan	Indikator Capaian	Yang diajukan untuk ditampung pada APBD T.A 2020 (Renja T.A 2020)	Realisasi
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAAN KEUANGAN DAERAH			
Pengelolaan SISMIOP Dan Pelayanan PBB-BPHTB	Terkelolanya SISMIOP dan Pelayanan PBB BPHTB	372.425.050,00	368.113.250,00
Operasi Penertiban Pajak Daerah	Terlaksananya Penertiban Pajak Daerah	334.934.000,00	296.359.000,00
Pemeliharaan Sistem IT PAD	Terpeliharanya Sistem IT PAD	52.500.000,00	52.170.000,00
Pengelolaan Pajak Daerah	Terkelolanya Pajak Daerah	255.080.000,00	212.661.013,00
Penyusunan Perubahan APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2018/ 2019/2020	Tersusun Perubahan APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2018/ 2019/2020	339.994.000,00	256.334.400,00
Penyusunan APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2020/2021	Tersusunnya APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2020/2021	237.230.000,00	171.986.000,00
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan APBD Kota Binjai Tahun 2019/ 2020	Tersusunnya Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan APBD Kota Binjai Tahun 2019/ 2020	33.794.000,00	26.275.000,00
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kota Binjai Tahun 2020	Tersusunnya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kota Binjai Tahun 2020	36.500.000,00,00	32.285.000,00,00
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kota Binjai Tahun 2019/ 2020	Tersusunnya Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kota Binjai Tahun 2019/ 2020	33.794.000,00	24.470.500,00
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Binjai Tahun 2020/ 2021	Tersusunnya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Binjai Tahun 2020/ 2021	34.800.000,00	27.812.550,00
Monitoring dan Evaluasi PAD	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi PAD	30.160.000,00	-
Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Se-Kota Binjai	Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD Se-Kota Binjai	246.811.150,00	222.780.000,00

Pendataan dan Penjaringan Potensi Baru Pajak Daerah Kota Binjai	Terdatanya dan terjaringnya Potensi Baru Pajak Daerah Kota Binjai	235.894.000,00	233.931.000,00
Pemeliharaan Sistem IT PBB	Terpeliharanya Sistem IT PBB	52.500.000,00	49.650.000,00
Penyampaian SPPT PBB 2019/ 2020	Terlaksananya Penyampaian SPPT PBB	111.264.000,00	104.323.500,00
Pembuatan Aplikasi BPHTB	Tersedianya Aplikasi BPHTB	90.000.000,00	87.670.000,00
Peningkatan Manajemen Aset Pemko Binjai	Meningkatnya Manajemen Aset Pemko Binjai	75.000.000,00	42.049.100,00
Pensertifikatan Tanah Tanah Milik Pemerintah Kota Binjai	Terbitnya Sertifikat Tanah Tanah Milik Pemerintah Kota Binjai	202.780.800	173.054.040
Penyusunan Pertanggung Jawaban APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2018/ 2019	Tersusunnya Pertanggung Jawaban APBD Kota Binjai	213.143.400	210.743.200
Operasi Sisir Dan Operasi Pencapaian Target	Terlaksananya Operasi Sisir dan Operasi Pencapaian Target	186.600.000	181.303.500
Sosialisasi PBB dan BPHTB	Terlaksananya Sosialisasi PBB dan BPHTB	30.663.525	23.454.000
Penjualan Barang-barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Binjai	-	-	-
Penghapusan Barang/ Gedung Milik Pemerintah Kota Binjai	-	-	-
Penilaian Barang Milik Pemerintah Kota Binjai	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Pemerintah Kota Binjai	85.527.500	23.576.000
Penatausahaan Barang-barang Inventaris SKPD Se-Kota Binjai	Terlaksananya Penatausahaan Barang-barang Inventaris SKPD Se-Kota Binjai	90.687.614	51.846.400
Penyusunan dan Implementasi SOP Penatausahaan, Penetapan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Implementasi SOP Penatausahaan, Penetapan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak Daerah	100.000.000	85.006.000
Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Tersusunnya Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	75.000.000	70.182.900
Percepatan Penyelesaian Permasalahan Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pengelolaan Aset Daerah serta Fasum Fasos Kota Binjai	Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pengelolaan Aset Daerah serta Fasum Fasos Kota Binjai	200.000.000	187.957.500
Penyediaan Aplikasi Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Aplikasi Pengelolaan Pajak Daerah	150.000.000	144.781.000
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH			
Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Kota Binjai	Terlaksananya Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Kota Binjai	101.007.250	84.927.250

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Target dan Realisasi Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2019-2020

Pada dasarnya analisis kinerja dilaksanakan untuk mengetahui efesiensi dan efektifitas dari pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditentukan. Dari analisis ini kita dapat mengambil suatu kesimpulan mengenai keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai suatu sasaran.

Keberhasilan atau kegagalan suatu program untuk mencapai sasaran dapat terukur melalui indikator yang telah kita tetapkan sebelumnya. Tanpa indikator yang jelas, rencana strategis tidak dapat diimplementasikan secara baik, karena tidak ada tolak ukur yang jelas mengenai apa yang ingin dicapai oleh setiap kegiatan. Indikator kinerja tidak hanya menunjukkan apa yang telah dicapai oleh semua kegiatan tetapi juga sejauh mana sumber-sumber daya yang digunakan secara efisien, efektif dan ekonomis bagi pelaksanaan kegiatan yang dimaksud.

Jika pada masa lalu kinerja Instansi Pemerintah dilihat kinerjanya melalui kemampuannya menyerap anggaran, maka pola ini telah diubah dengan sistem Laporan Kinerja yaitu dengan menerapkan indikator kinerja yang tidak hanya mengukur tingkat penyerapan sumber daya, tetapi juga kesesuaian sumber daya yang diserap dengan hasil yang diperoleh sebagaimana yang direncanakan dalam rencana strategis.

Adapun peranan indikator kinerja dalam managemen antara lain :

a. Sebagai alat untuk memastikan pemahaman para pelaksana terhadap ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja.
b. Sebagai sarana untuk memonitor sejauh mana upaya yang telah dilakukan mendekati pencapaian kinerja yang ditetapkan.
c. Sebagai sarana untuk mengevaluasi pencapaian kinerja dengan membandingkan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.
d. Sebagai alat untuk memberikan penghargaan ataupun hukuman yang objektif bagi para pelaksana.
e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
f. Menjadi alat untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.
g. Menjadi alat untuk membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
h. Menjadi alat untuk memastikan pengambilan keputusan secara objektif.

Secara umum fungsi indikator kinerja antara lain :

1. Memperjelas tentang apa yang akan dihasilkan dan kapan hasil tersebut dicapai dari suatu kegiatan.

2. Menciptakan konsensus berbagai pihak yang berkepentingan untuk menghindari kesalahan interpretasi pelaksanaan kebijakan/program kegiatan.
3. Menjadi dasar bagi pengukuran analisis dan evaluasi terhadap kinerja instansi pemerintah.

Tahun 2020 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya mendapatkan dana sebesar Rp. 25.162.108.913,- yang bersumber dari Dana APBD dan Setelah Perubahan APBD sebesar 20.933.377.131,- dengan perincian sebagai berikut :

- Belanja Langsung Rp. 6.805.944.080,-
- Belanja Tidak Langsung Rp. 14.127.433.051,-

J U M L A H Rp. 20.933.377.131,-

Belanja langsung telah terealisasi sebesar Rp. 5.792.098.776,- sedangkan Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp. 13.497.310.848,-

Dalam rangka menganalisis pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2020 kita akan melihat kegiatan yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai sampai tahun 2020 dan membandingkan dengan realisasinya di akhir tahun.Laju perbandingan Target dan Realisasi Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2019 dan 2020 terlihat pada table 2.1.

2. Kendala / Hambatan Pencapaian Target Tahun 2020

Berdasarkan realisasi pada tahun 2020 dan capaian target sampai akhir tahun, secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai dan solusi yang telah dilakukan berkaitan dengan permasalahan tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

NO	PERMASALAHAN	KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT	UPAYA PENYELESAIAN YANG PERNAH DILAKSANAKAN	KET
1	Dalam mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Kementerian Teknis dari Pusat masih belum dapat diterapkan dan dipahami	Oleh beberapa Organisassi Perangkat Daerah (OPD)	Menghadirkan beberapa (OPD) untuk diperjelas	-
2	Masih kurangnya pemahaman tentang peraturan-peraturan yang ada di dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	Oleh beberapa Organisassi Perangkat Daerah (OPD)	Menghadirkan beberapa OPD untuk diperjelas tentang peraturan yang ada	-
3	Terlambatnya Laporan SPJ Fungsional yang disampaikan oleh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai	Bendahara Pengeluaran OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai	Monitoring ke OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai	-
4	Terlambatnya laporan Keuangan di SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendahara OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai	Mengadakan Workshop Pejabat Penatausaan Keuangan OPD dan Bendahara Pengeluaran OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai bekerjasama dengan BKD Kota Binjai melaksanakan Bimtek pembuatan Laporan Keuangan OPD	-
5	Inventarisasi dan Pensertifikasi tanah-tanah milik Pemerintah Kota Binjai	BPN, Bagian Hukum, Bagian Tata Pemerintahan, Kecamatan, Kelurahan, OPD pengguna tanah milik Pemko	1. Pengukuran ulang dengan instansi terkait 3. Konfirmasi dan penandatanganan batas-batas tanah 4. Nomor sertifikat tanah dicantumkan dalam KIB	-
6	Penilaian dan Penghapusan barang milik Pemko Binjai	OPD Pengguna Barang Bagian Hukum, DPRD Kota Binjai, Inspektorat	Inventaris, Penelitian / Cek Fisik terhadap barang yang akan dihapuskan	-
7	Masih ada beberapa jenis penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah yang tidak mencapai target	Bendahara Penerimaan di OPD di lingkungan Pemko Binjai	Agar disesuaikan target dengan potensi pajak dan retribusi yang ada di lapangan	

8	Masih kurangnya SDM (pengutip) dan potensi di lapangan kecil	OPD Pengelola Penerimaan dan instansi terkait lainnya	Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petugas	

3. Target dan Realisasi Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja pada Renstra 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang guna mendukung RPJMD Kota Binjai 2016-2021. Gambaran selengkapnya tentang kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai yang dialokasikan pada Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi, Bidang Pengelolaan Aset Daerah serta Pajak Retribusi dan Pajak Daerah lainnya, bidang PBB & BPHTB Kegiatan Pendukung lainnya dapat dilihat pada matriks program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai pada table 3.1 berikut ini :

C. Akuntabilitas Keuangan

1. Keadaan Tahun 2020, Program Anggaran, Realisasi dan Capaian (%)

No		Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1		2	3	4	5
1		**PROGRAM PELAYANAN ADM. PERKANTORAN**			
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	130.000.000	88.550.950	68,12
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	505.340.000	414.926.415	82,11
	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	33.090.000	11.025.400	33,32
	7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	298.249.200	296.377.200	99,37
	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	141.335.520	141.209.524	100
	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	202.300.000	201.007.720	99,36
	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	185.999.650	185.842.450	99,92
	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	7.803.500	52,02
	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	39.160.000	25.905.000	66,15
	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	90.495.660	57.252.488	63,27
	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	282.398.374	177.089.750	62,71
	19	Penyediaan Jasa Premi Asuransi Kesehatan	15.840.000	13.753.854	86,83
	20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	43.600.000	26.500.000	60,78
2		**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**			
	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	59.995.500	59.564.780	99,28
	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	58.250.000	57.220.000	98,23
	10	Pengadaan Mebeleur	112.050.043	111.926.600	99,89
	22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	75.640.000	55.762.500	73,72
	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	286.272.204	217.155.397	75,86
	26	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	41.240.000	31.553.000	76,51
	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	36.600.000	31.665.000	86,52
	50	Pemeliharaan Jaringan Online Sistem informasi manajemen keuangan daerah	85.000.000	84.175.000	99,03

6		**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**			
	5	Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulan dan Semesteran	59.997.640	50.130.145	83,55
17		**PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**			
	2	Pengelolaan SISMIOP Dan Pelayanan PBB-BPHTB	372.425.050	368.113.250	98,84
	3	Operasi Penertiban Pajak Daerah	334.934.000	296.359.000	88,48
	4	Pemeliharaan Sistem IT PAD	52.500.000	52.170.000	99,37
	5	Pengelolaan Pajak Daerah	255.080.000	212.661.013	83,37
	6	Penyusunan Perubahan APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2018/ 2019/2020	339.994.000	256.334.400	75,39
	7	Penyusunan APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2020/2021	237.230.000	171.986.000	72,50
	8	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan APBD Kota Binjai Tahun 2019/ 2020	33.794.000	26.275.000	77,75
	9	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kota Binjai Tahun 2020	36.500.000,00	32.285.000,00	88,45
	10	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kota Binjai Tahun 2019/ 2020	33.794.000,00	24.470.500,00	72,41
	11	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Binjai Tahun 2020/ 2021	34.800.000,00	27.812.550,00	79,92
	25	Monitoring dan Evaluasi PAD	30.160.000	-	-
	46	Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Se-Kota Binjai	246.811.150	222.780.000	90,26
	72	Pendataan dan Penjaringan Potensi Baru Pajak Daerah Kota Binjai	235.894.000,00	233.931.000,00	99,17
	74	Pemeliharaan Sistem IT PBB	52.500.000,00	49.650.000,00	94,57
	99	Penyampaian SPPT PBB 2019/ 2020	111.264.000,00	104.323.500,00	93,76
	106	Pembuatan aplikasi BPHTB	90.000.000,00	87.670.000,00	97,41
	107	Peningkatan Manajemen Aset Pemko Binjai	75.000.000,00	42.049.100,00	56,07
	109	Pensertifikatan Tanah Tanah Milik Pemerintah Kota Binjai	202.780.800	173.054.040	85,34
	110	Penyusunan Pertanggung Jawaban APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2018/ 2019	213.143.400	210.743.200	98,87
	113	Operasi Sisir Dan Operasi Pencapaian Target	186.600.000	181.303.500	97,16
	114	Sosialisasi PBB dan BPHTB	30.663.525	23.454.000	76,49
	115	Penjualan Barang-barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Binjai	-	-	-

	116	Penghapusan Barang/ Gedung Milik Pemerintah Kota Binjai	-	-	-
	117	Penilaian Barang Milik Pemerintah Kota Binjai	85.527.500	23.576.000	27,57
	118	Penatausahaan Barang-barang Inventaris SKPD Se-Kota Binjai Tahun 2019	90.687.614	51.846.400	57,17
	119	Penyusunan dan Implementasi SOP Penatausahaan, Penetapan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak Daerah	100.000.000	85.006.000	85,01
	120	Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	75.000.000	70.182.900	93,58
	121	Percepatan Penyelesaian Permasalahan Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pengelolaan Aset Daerah serta Fasum Fasos Kota Binjai	200.000.000	187.957.500	93,98
	122	Penyediaan Aplikasi Pengelolaan Pajak Daerah	150.000.000	144.781.000	96,52
40		**PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH**			
	1	Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Kota Binjai	101.007.250	84.927.250	84,08
		JUMLAH	**6.805.944.080**	**5.792.098.776**	**85,10**

D. PERBANDINGAN PENDAPATAN DAERAH TERHADAP PAD BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2020

NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	PAJAK HOTEL	194.310.000,00	138.893.200,00	71,48
2	PAJAK RESTORAN	5.514.479.106,00	5.894.432.908,00	106,89
3	PAJAK HIBURAN	622.473.023,00	458.408.644,40	73,64
4	PAJAK REKLAME	1.746.972.864,00	1.508.359.140,26	86,34
5	PAJAK GENSET	33.000.000,00	61.050.578,00	185,00
6	PAJAK PPJ PLN	23.336.989.086,00	23.166.128.955,00	99,27
7	PAJAK PARKIR	707.962.847,00	581.767.923,00	82,17
8	PAJAI AIR BAWAH TANAH	155.614.787,00	162.879.057,72	104,67
9	PAJAK SARANG WALET	14.268.000,00	15.309.000,00	107,30
10	PBB PERKOTAAN	28.512.500.000,00	8.011.181.397,00	28,10
11	BPHTB PEMINDAHAN HAK	21.643.201.462,00	25.729.028.415,00	118,88
	JUMLAH	**82.481.771.175,00**	**65.727.439.218,38**	**79,69**

Berdasarkan Target dan Realisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) Tahun 2020 ada bebrapa jenis penerimaan yang tidak tercapai yaitu Pajak Hotel (71,48 %), Pajak Reklame (86,34 %), Pajak Parkir (82,17 %), dan PBB Perkotaan (28,10 %). Adapun kendala yang dihadapi sehingga target beberapa Pajak tidak tercapai karena adanya Pandemi Covid 19 sehingga menyebabkan :

- Pajak Hotel karena kurangnya pengunjung hotel dan tidak beroperasi sementara waktu;
- Pajak Hiburan tidak ada potensi Pajak Hiburan baru dan tempat hiburan yang tidak beroperasi lagi;
- Pajak Reklame kurangnya konsumen untuk mempromosikan usahanya dengan pemasangan reklame;
- Pajak Parkir karena kurangnya mobilitas perpakiran;
- PBB Perkotaan karena masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya membayar PBB dan juga tingkat perekonomian masyarakat yang menurun.

Agar target jenis pajak tersebut dapat tercapai di Tahun depan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu :

1. Melakukan pendataan ulang terhadap Pajak Hiburan di Tahun 2020;

2. Melaksanakan mengoptimalkan pemasangan perangkat perekam data transaksi usaha wajib pajak di lokasi usaha wajib pajak untuk meminimalisir kebocoran PAD dari sector Pajak Daerah (lost income);
3. Meningkatkan kerjasama dengan melakukan koordinasi antara BPKAD dengan pihak Kepala Wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Kepala Lingkungan untuk menghimbau kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak, sehingga diharapkan target PBB Perkotaan dapat tercapai.

TARGET DAN REALISASI CAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019-2020

(Table 2.1)

NO	KEGIATAN	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Alokasi APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Kinerja Tahun 2019 (%)	Alokasi APBD (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Kinerja Tahun 2020 (%)
1	2	6	7	8	6	7	8
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	130,000,000	109,611,500	84.32	130,000,000	88,550,950	68.12
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	358,000,000	327,414,723	91.46	505,340,000	414,926,415	82.11
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	15,991,500	6,950,312	43.46	33,090,000	11,025,400	33.32
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	181,317,200	179,837,200	99.18	298,249,200	296,377,200	99.37
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	124,997,875	124,997,875	100.00	141,335,520	141,209,524	99.91
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	163,445,394	161,945,600	99.08	202,300,000	201,007,720	99.36
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	224,982,000	203,991,580	90.67	185,999,650	185,842,450	99.92
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	135,000,000	116,402,300	86.22	15,000,000	7,803,500	52.02
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	50,000,000	29,390,000	58.78	39,160,000	25,905,000	66.15
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	74,981,000	58,326,000	77.79	90,495,660	57,252,488	63.27
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	675,499,084	647,698,542	95.88	282,398,374	177,089,750	62.71
12	Penyediaan Jasa Premi Asuransi Kesehatan	15,840,000	13,235,238	83.56	15,840,000	13,753,854	86.83
13	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	43,200,000	43,200,000	100.00	43,600,000	26,500,000	60.78
14	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	128,634,000	126,977,200	98.71	59,995,500	59,564,780	99.28

1	2	6	7	8	6	7	8
15	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	492,030,980	484,176,540	98.40	58,250,000	57,220,000	98.23
16	Pengadaan Mebeleur	-	-	-	112,050,043	111,926,600	99.89
17	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	135,736,200	135,074,000	99.51	75,640,000	55,762,500	73.72
18	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	559,750,000	180,440,733	32.24	286,272,204	217,155,397	75.86
19	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	75,000,000	58,612,000	78.15	41,240,000	31,553,000	76.51
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	29,070,000	28,415,000	97.75	36,600,000	31,665,000	86.52
21	Pemeliharaan Jaringan Online Sistem informasi manajemen keuangan daerah	140,000,000	139,166,000	99.40	85,000,000	84,175,000	99.03
22	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	154,150,000	146,280,000	94.89	-	-	-
23	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	72,530,000	71,610,000	98.73	-	-	-
24	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	51,530,000	50,703,400	98.40	-	-	-
25	Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulan dan Semesteran	80,301,950	75,586,370	94.13	59,997,640	50,130,145	83.55
26	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	5,992,925	4,541,830	75.79	-	-	-
27	Pengelolaan SISMIOP Dan Pelayanan PBB-BPHTB	469,413,800	456,238,100	97.19	372,425,050	368,113,250	98.84
28	Operasi Penertiban Pajak Daerah	98,510,000	51,185,000	51.96	334,934,000	296,359,000	88.48
29	Pemeliharaan Sistem IT PAD	52,500,000	-	-	52,500,000	52,170,000	99.37
30	Pengelolaan Pajak Daerah	409,059,000	214,408,600	52.42	255,080,000	212,661,013	83.37
31	Apresiasi Keberhasilan Target PBB	-	-	-	-	-	-
32	Penyusunan Perubahan APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2019/2020	314,999,664	238,030,120	75.57	339,994,000	256,334,400	75.39

1	2	6	7	8	6	7	8
33	Penyusunan APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2020/2021	334,997,288	236,433,610	71	237,230,000	171,986,000	72.50
34	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan APBD Kota Binjai Tahun 2019/ 2020	49,999,500	18,078,050	36.16	33,794,000	26,275,000	77.75
35	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kota Binjai Tahun 2020	59,997,950.00	32,180,870.00	53.64	36,500,000.00	32,285,000.00	88.45
36	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kota Binjai Tahun 2020/2021	49,999,480.00	30,579,580.00	61.16	33,794,000.00	24,470,500.00	72.41
37	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Binjai Tahun 2020/ 2021	-	-	-	34,800,000.00	27,812,550.00	79.92
38	Monitoring dan Evaluasi PAD	23,040,000	3,274,000	14.21	30,160,000	-	-
39	Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Se-Kota Binjai	249,991,000	195,273,824	78.11	246,811,150	222,780,000	90.26
40	Pendataan dan Penjaringan Potensi Baru Pajak Daerah Kota Binjai	48,994,000.00	45,408,000.00	92.68	235,894,000.00	233,931,000.00	99.17
41	Pemeliharaan Sistem IT PBB	52,500,000.00	36,498,250.00	69.52	52,500,000.00	49,650,000.00	94.57
42	Penyampaian SPPT PBB 2019/ 2020	112,435,000.00	104,864,350.00	93.27	111,264,000.00	104,323,500.00	93.76
43	Pembuatan aplikasi BPHTB	-	-	-	90,000,000.00	87,670,000.00	97.41
44	Peningkatan Manajemen Aset Pemko Binjai	-	-	-	75,000,000.00	42,049,100.00	56.07
45	Pensertifikatan Tanah Tanah Milik Pemerintah Kota Binjai	-	-	-	202,780,800	173,054,040	85.34
46	Penyusunan Pertanggung Jawaban APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2018/2019	300,000,000	298,994,613	99.66	213,143,400	210,743,200	98.87
47	Operasi Sisir Dan Operasi Pencapaian Target	316,970,000	255,531,875	80.62	186,600,000	181,303,500	97.16
48	Sosialisasi PBB dan BPHTB	-	-	-	30,663,525	23,454,000	76.49

1	2	6	7	8	6	7	8
49	Penjualan Barang-barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Binjai	19,383,000	-	-	-	-	-
50	Penghapusan Barang/ Gedung Milik Pemerintah Kota Binjai	23,668,000	5,275,500	22.29	-	-	-
51	Penilaian Barang Milik Pemerintah Kota Binjai	52,883,900	2,043,000	3.86	85,527,500	23,576,000	27.57
52	Apresiasi Keberhasilan Target PBB	-	-	;-	-	-	-
53	Penatausahaan Barang-barang Inventaris SKPD Se-Kota Binjai Tahun 2019	12,673,500	8,981,500	70.87	90,687,614	51,846,400	57.17
54	Penyusunan dan Implementasi SOP Penatausahaan, Penetapan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak Daerah	-	-	-	100,000,000	85,006,000	85.01
55	Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	;-	-	-	75,000,000	70,182,900	93.58
56	Percepatan Penyelesaian Permasalahan Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pengelolaan Aset Daerah serta Fasum Fasos Kota Binjai	-	-	-	200,000,000	187,957,500	93.98
57	Penyediaan Aplikasi Pengelolaan Pajak Daerah	-	-	-	150,000,000	144,781,000	96.52
58	Inventarisasi Pensertifikatan Tanah Tanah Milik Pemerintah Kota Binjai	13,000,000	12,726,840	97.90	-	-	-
59	Pelelangan dan penjualan Barang-barang Milik Pemerintah Kota Binjai	-	-	-	-	-	-
60	Penghapusan Barang-barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Binjai untuk Bangunan/Gedung Tahun 2017	-	-	-	-	-	-
61	Penjualan Barang-barang Hasil Bongkaran Bangunan	-	-	-	-	-	-
62	Penatausahaan Barang barang Inventaris SKPD Se-Kota Binjai	24,674,000	24,674,000	100.00			-
63	Rekonsiliasi Laporan Barang Inventaris SKPD Se-Kota Binjai Tahun 2018	1,400,000	600,000	42.86	-	-	-
64	Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Kota Binjai Tahun 2018/2019	200,000,000	161,042,300	80.52	101,007,250	84,927,250	84.08

1	2	6	7	8	6	7	8
65	Perubahan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah	-	-	-	-	-	-
66	Penilaian Zona Nilai Tanah Kota Binjai	-	-	-	-	-	-
67	Perubahan Peraturan Walikota No.30 Tahun 2011 tentang pajak Daerah	-	-	-	-	-	-
68	Pendampingan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Barang Persediaan	150,000,000	148,541,074	99.03	-	-	-
69	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2019	59,999,950	20,430,450	34.05	-	-	-
70	Sensus Barang Milik Pemerintah Kota Binjai	170,200,000	130,924,600	76.92	-	-	-
71	Rekonsiliasi Laporan Barang Inventaris SKPD Se-Kota Binjai Tahun 2019	49,872,400	22,825,500	45.77	-	-	-
72	Inventarisasi pensertifikatan Tanah Tanah Milik Pemerintah Kota Binjai	60,197,000	15,609,700	25.93	-	-	-
	JUMLAH	**7,899,338,540**	**6,295,237,249**	**79.69**	**6,805,944,080**	**5,792,098,776**	**85.10**

Tabel 3.1
TARGET DAN REALISASI CAPAIAN KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BINJAI
Periode 2016 s/d 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatkan efisiensi belanja dan pengelolaan aset daerah secara optimal.	1. Persentase barang milik daerah yang sudah didata	-	-	100%	95.74 %	100%	80.35 %	100%	79.15 %	100%	86.00%	-	-
		2 Persentase Pemanfaatan aplikasi sistem informasi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan	90%	95%	90%	95%	90%	95%	90%	95%	90%	95%	90%	97%
		3. Persentase Jumlah SKPD yang dapat menyusun RKA-DPA dengan benar	90%	80%	90%	85%	90%	75%	90%	87%	90%	97%	95%	98%
		4. Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah	90%	102%	95%	102%	90%	103%	95%	105%	95%	110%	95%	115%

2	Meningkatkan kualitas laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase Opini laporan keuangan Pemko Binjai meningkat	WTP	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP	
3	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan publik meningkat	100%	90%	100%	90%	100%	95%	100%	95%	100%	98%	100%	100%
4	Mengkoordinasikan penyelenggaraan sistem pengendalian intern	Laporan keuangan yang dihasilkan telah menggambarkan sistem pengendalian intern yang baik	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	92%	90%	95%

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai

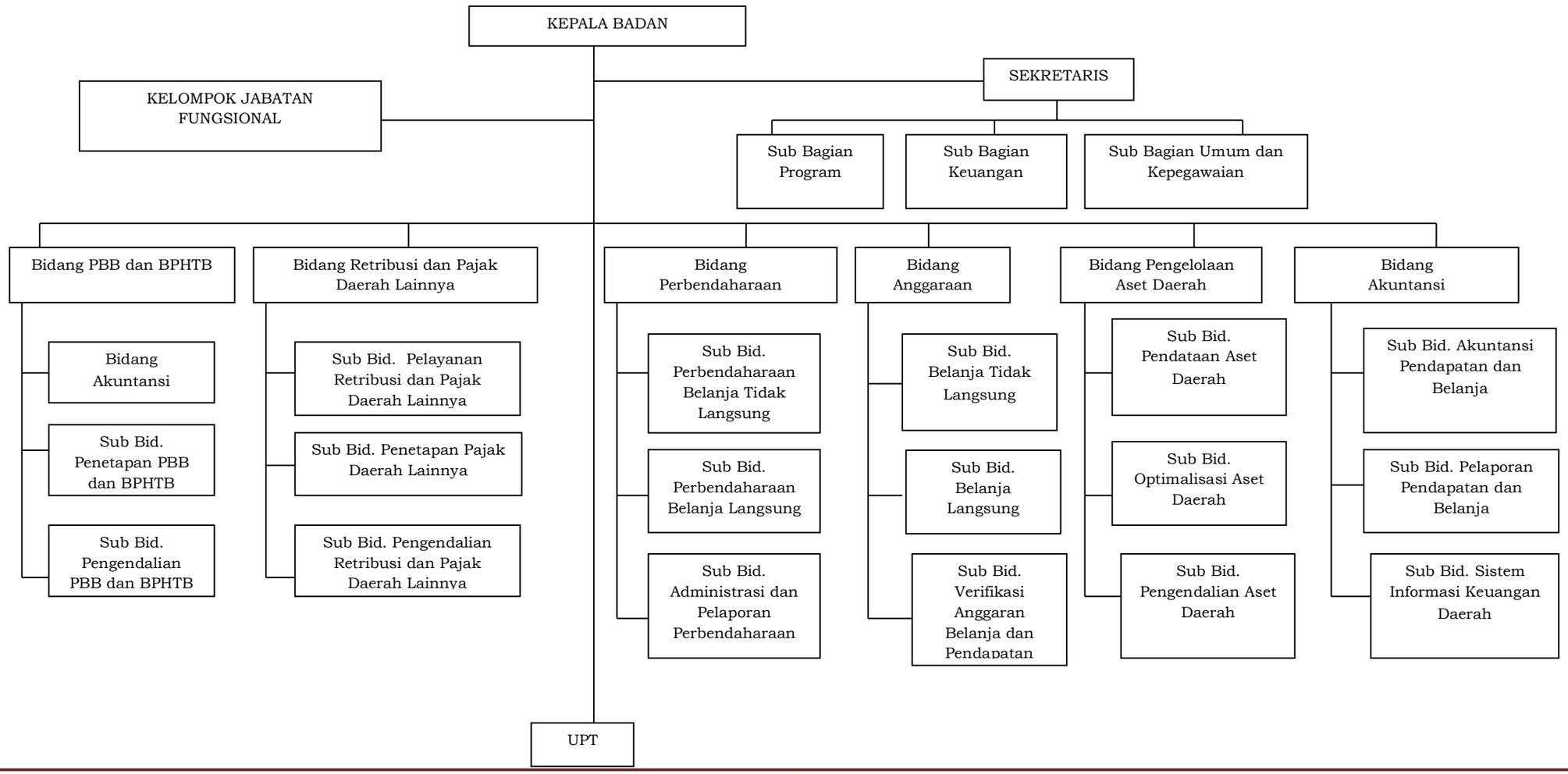

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) dari Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai Tahun 2020. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturann Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintah yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LAKIP Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai melakukan perbaikan dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Binjai.

B. Saran-saran

Beberapa hal yang akan dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai untuk meningkatkan kinerja pada tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Setiap OPD menyelesaikan SPJ dan laporan keuangan tepat waktu.
2. Meningkatnya kinerja aparatur dan pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai yang maksimal dengan meningkatkan disiplin PNS dalam bekerja.
3. Adanya keselarasan dalam pekerjaan dengan target yang akan dicapai.

4. Selalu berkoordinasi dengan instansi lain permasalahan yang dihadapi dalam merealisasikan program dan kegiatan.
5. Melakukan monitoring dan cek fisik langsung ke lapangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang. Demikian Laporan Kinerja ini kami susun dan semoga bermanfaat bagi kita semua.